

Tebingan Setinggi 500 Meter di Cijeruk Bogor Longsor

BOGOR (IM)- Tebingan di wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor longsor. Hal itu disebabkan kondisi yang tanah labil dan diguyur hujan deras.

“Dikarenakan hujan deras dan pembukaan akses jalan di atas lahan mengakibatkan longsor,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya, Jumat (24/5).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Kamis 23 Mei 2024. Terdapat dua titik longsor di lokasi yakni titik pertama panjang longsor sekitar 150 meter, tinggi 500 meter dan lebar 3 meter serta titik kedua panjang 100 meter, tinggi 500 meter dan lebar

3 meter.

“Saat ini masih terdapat retakan di titik longsor yang berpotensi terjadi longsor susulan,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin mengatakan bahwa kondisi tanah labil karena tanah pengerukan untuk pembuatan jalan. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

“Jadi itu tanahnya pengerukan pembuatan jalan di pinggir tebingan. Di bawahnya sawah aja, tidak ada rumah warga. Sudah ditangani yang berwajib,” pungkasnya. **gio**

Apdesi Dilarang Deklarasi Calon Kepala Daerah

PURWAKARTA (IM)- Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Dedi Mulyadi menyampaikan agar anggota organisasi itu tidak mendeklarasikan dukungan terhadap calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

“Secara institusi organisasi, Apdesi tidak boleh mendeklarasikan dukungan terhadap para calon kepala daerah,” kata Dedi dalam keterangannya yang diterima, kemarin.

Disebutkan bahwa saat Apdesi Jabar yang beranggotakan seluruh kepala desa di Jawa Barat memberikan dukungan dan doa kepada dirinya untuk menjadi kandidat calon gubernur Jabar beberapa waktu lalu di Kabupaten Garut, ia merasa keberatan. Karena tidak sepatutnya organisasi pemerintahan melakukan hal tersebut.

“Kalau Apdesi mendeklarasikan, nanti Apekasi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

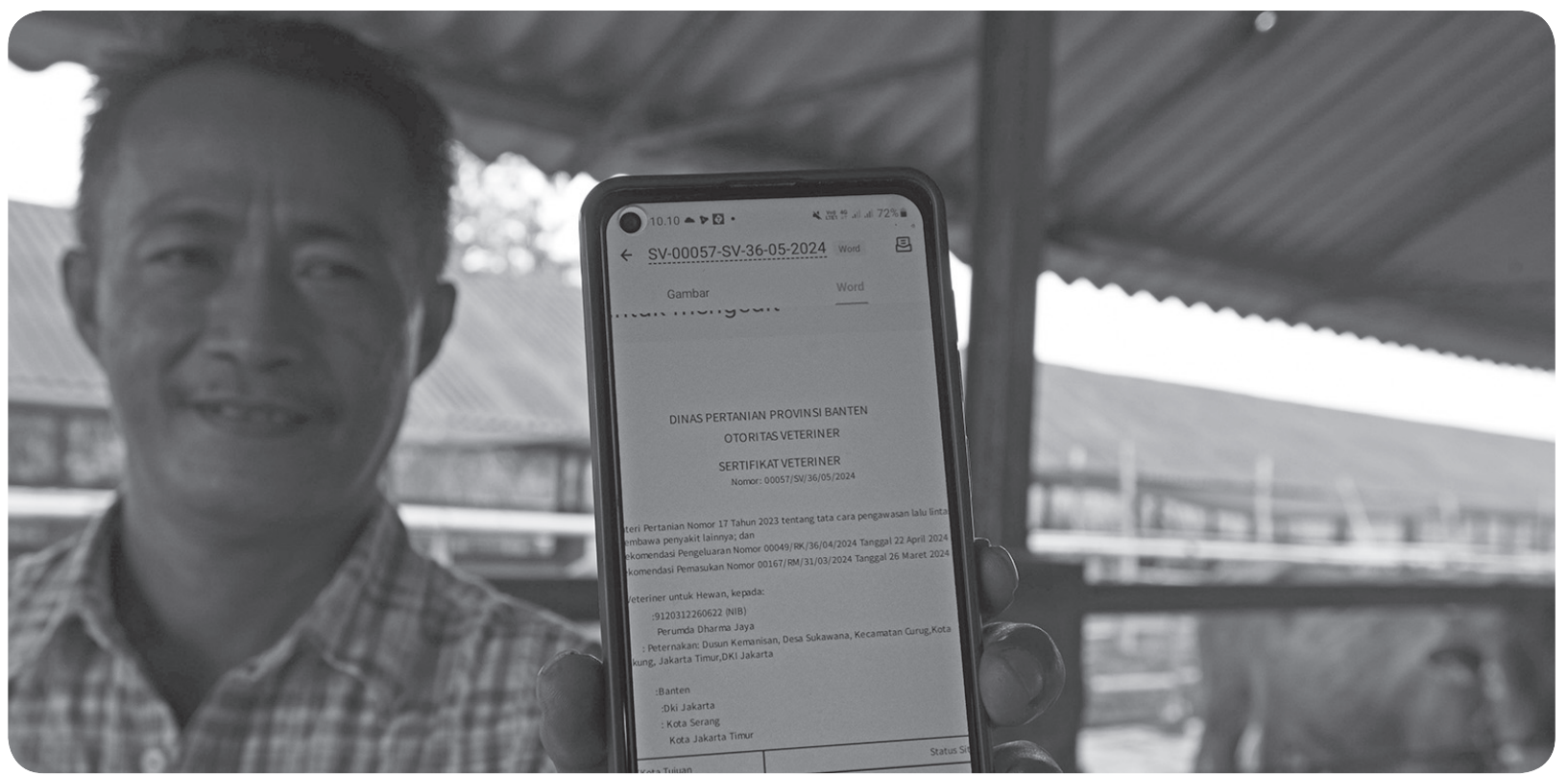
mendeklarasikan, nanti ada asosiasi gubernur juga ikut mendeklarasikan,” katanya.

Menurut dia, memberikan dukungan adalah hal pribadi seseorang dan tidak boleh dibawa ke dalam institusi organisasi. Ia tak ingin dukungan tersebut malah dipolitisasi.

Ia menyampaikan agar pemerintah desa fokus melakukan pembangunan desa, yakni dengan membuat roadmap pembangunan. Sehingga uang yang mengalir ke desa baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat bisa saling melengkapi.

Jika hal tersebut dilakukan maka dalam satu periode pemerintahan kepala desa, pembangunan bisa selesai. Dedi juga menekankan agar ada tata ruang desa. “Sekarang ini tidak ada tata ruang desa. Orang mau bangun apa saja tidak ada izin dari kepala desa. Ini harus dibuat, kalau tidak, desa bisa berantakan,” katanya. **pp**

8 Nusantara



PENYUNTIKAN VAKSIN PMK HEWAN KURBAN DI BANTEN

Peternak memperlihatkan sertifikat kesehatan hewan bebas penyakit kuku dan mulut (PMK) di Curug, Serang, Banten, Jumat (24/5). Penyuntikan itu untuk menjaga kesehatan hewan dan mencegah terjadinya wabah PMK menjelang hari raya kurban.

Dua Mantan Ketua Parpol Ingin Perubahan Kepemimpinan di Kab. Bogor

Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode mendatang harus yang terbaik, dan itu tanggung jawab kita bersama agar Kabupaten Bogor dipimpin oleh sosok yang tepat dan bukan yang selalu berbicara atas nama rakyat tapi kenyataannya dzolim ke rakyat, tutur Ade Wardhana Adinata dan Mulyadi.

CIBINONG (IM)- Tokoh Bogor, yang juga mantan Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat dan DPD Partai Gerindra Jawa Barat yaitu Ade Wardhana Adinata dan Mulyadi kompak mengharapkan perubahan kepemimpinan di Kabupaten Bogor.

Hal itu, agar Bupati-Wakil Bupati Bogor 2024

terpilih mendatang, bisa mensejahterakan dan mencerdaskan bangsanya.

“Saya dan Kang Mulyadi memiliki kesamaan pandangan, bahwa Kabupaten Bogor ini harus ada perubahan terkait kepemimpinan, agar terjawab harapan warga mengenai kepemimpinan yang bisa

mensejahterakan mencerdaskan warganya,” ucap Ade Wardhana Adinata kepada wartawan, Jumat (24/5).

Ade Wardhana Adinata menerangkan bahwa ia banyak membaca pemberitaan dan gagasan Kang Mulyadi mengenai Kabupaten Bogor, maka dalam menghadapi Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor Bulan November 2024, kita merumuskan berbagai program yang bisa langsung dilaksanakan serta dieksekusi dalam menjamin kesejahteraan warga Bogor kedepan.

“Apa lagi Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan warga Kabupaten Bogor, harus kita dukung program beliau dan agar dapat dirasakan dalam 100 hari kepemimpinan beliau khususnya di Bumi Tegar Beriman,” terangnya.

Sementara itu Mulyadi menuturkan sesama putra asli daerah, ia dan Ade Wardhana Adinata sama-sama menginginkan perubahan dan kepala daerah yang tepat.

“Bupati-Wakil Bupati Bogor harus yang terbaik, tanggung jawab kita bersama agar Kabupaten Bogor dipimpin oleh sosok yang tepat dan bukan yang selalu berbicara atas nama rakyat tapi kenyataannya dzolim ke rakyat,” tutur Mulyadi.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Bogor adalah kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, maka sebelum keluar Kabupaten Bogor, maka Bumi Tegar Beriman harus lebih maju dan bisa mengeksekusi program beliau untuk kesejahteraan masyarakatnya.

“Jangan jadikan ajang

Pilbup Bogor hanya untuk memilih pemimpin yang orientasi mendapatkan kekuasaan tetapi tidak memiliki niat baik, kompetensi, jiwa pengabdian dan berbakti yang sungguh-sungguh untuk rakyatnya,” tambahnya.

Ia pun berharap, sebelum ajang Pilbup Bogor 2024, diawali dengan mengaudit Kabupaten Bogor dari semua sektor lalu lakukan pengaturan ulang semua untuk orientasi hanya kesejahteraan rakyatnya.

“Sebagai putra daerah, Saya pastikan akan ikut mengawal proses suksesi kepemimpinan di Kabupaten Bogor. Di mana Bupati Bogor mendatang harus memiliki karakter, kompetensi, bersih, jernih dan mengahgahi serta mencintai rakyatnya,” harap Mulyadi. **gio**



PAMERAN DAN KONTES BONSAI DI KENDARI

Pengunjung melintas di antara tanaman bonsai yang dipamerkan di pelataran Eks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (24/5). Perkumpulan penggemar bonsai Indonesia Kendari menggelar kontes dan pameran yang diikuti 291 tanaman hias bonsai sebagai ajang silaturahmi bagi penghobi bonsai.

Mesin Nawasena, Salah Satu Alternatif Pengolahan Sampah di Kota Bandung

BANDUNG (IM)- Komunitas Tionghoa Kota Bandung membuat inovasi pengolahan sampah dengan alat Nawasena. Menggandeng sejumlah ahli mesin, komunitas ini membuat mesin pengolahan sampah residu dan non residu tanpa harus dipilah terlebih dahulu.

Cara kerja alat ini yaitu sampah organik dan sampah plastik atau residu langsung dimasukkan ke alat pencah. Sehingga sampah menjadi cacahan kecil.

Kemudian, cacahan sampah tersebut diberi tepung tapioka dan dicampur ramuan semacam zat adiktif seperti serbuk pakan ikan. Setelah dimasukkan ke dalam alat lainnya adalah briket.

Dari hasil pengujian bahan bakar untuk memasak, api yang dihasilkan tidak berbau. Setelah itu, hasil olahan sampah dicetak menjadi briket. Dengan briket sampah ini bisa mendidihkan air hanya tiga menit.

Teknisi Mesin Nawasena, Yaya Suhaya menyebut,

sampai saat ini, sudah ada beberapa daerah lain yang menggunakan mesin pengolah sampah tersebut. Misalnya di Indramayu, yang kabarnya telah memesan enam set alat ini.

“Selain mesin pengolahan sampah residu, mesin kompor Biomas untuk memanfaatkan sampah kayu dan daun menjadi bahan bakar. Sejumlah pabrik di Indramayu dan lainnya sudah banyak menggunakan kompor tersebut,” kata Yaya Suhaya, Jumat (24/5).

Sementara itu, Ketua Duta Toleransi Kota Bandung, Tan Tjong Boe menyebut, pengolahan sampah menjadi briket ini bermanfaat secara ekonomi maupun lingkungan. Juga merupakan salah satu alternatif persoalan sampah di Kota Bandung.

“Mesin ini kami beri nama Nawasena, dan bisa mengolah sampah organik dan residu tiga ton per tujuh jam,” kata Tan Tjong Boe. **pra**

SEMPAT MOGOK KERJA

Ratusan Sopir Truk Sampah DLH Kota Bogor Kembali Beroperasi

BOGOR (IM)- Ratusan sopir truk sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor yang sempat mogok kerja sudah kembali beroperasi. Pengangkutan sampah di Kota Bogor sudah berjalan normal. “Sudah sejak kemarin sudah beroperasi seperti biasa, normal, lancar,” kata PJ Wali Kota Bogor, Hery Antasari dikonfirmasi, Jumat (24/5).

Kata dia, terkait aspirasi para sopir truk sebelumnya terkait operasional tambahan sudah dikaji oleh Pemerintah Kota Bogor. Diharapkan semua berjalan lancar dan bisa mengakomodir aspirasi sopir truk.

“Yang terpenting sekarang pelayanan angkutan sampah sudah normal kembali. Biaya operasional tambahan (sopir truk sampah) melalui mekanisme anggaran yang ada setelah kajian

teknis, lapangan dan administrasi sudah dilakukan oleh Pemkot. Insya Allah lancar. Semua dinamika ini biasa dalam pelayanan publik. Mudah-mudahan menjadi hikmah untuk lebih baik lagi ke depan,” pungkasnya.

Selainnya, ratusan sopir truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor melakukan mogok kerja pada Rabu (22/5). Pengangkutan dan distribusi sampah dari Kota Bogor ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor sempat terhenti.

Terdapat sekitar 130 sopir truk dan armada yang tidak beroperasi sementara. Ada beberapa alasan para sopir melakukan aksi mogok tersebut. “Sopir-sopir itu kan sepanjang hari setahun nggak pernah istirahat. Jadi hari ini mereka sebetulnya ingin

juga ngerasain libur. Kedua, ada keinginan dari teman-teman bahwa selama ini ada operasional di jalan. Itu sedang kita upayakan, kita proses,” kata Kadis DLH Kota Bogor Denni Wisanto kepada wartawan.

Biaya operasional yang dimaksud, sambung Denni, misalnya saat beroperasi truk yang mengangkut sampah mengalami pecah ban ditanggulangi oleh sopir sendiri. Saat ini, pihaknya sedang berupaya untuk mengakomodir keinginan para sopir truk.

“Namanya di jalan banyak kebutuhan-kebutuhan. Selama ini kebutuhan di jalan itu ditanggulangi oleh sopir. Lama-lama juga mungkin mereka berat, harus jadi beban kita. Ini lah yang kita coba usulkan, mudah-mudahan ada solusi terbaik,” pungkasnya. **pp**



PENERAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI MEBEL

Pekerja menurunkan bahan baku untuk dijadikan lemari dan meja di Jalan Gelap Nyawang, Bandung, Jabar, Jumat (24/5). Menkop dan UKM Teten Masduki mengatakan, sektor usaha mebel dan kerajinan menjadi pilar penting dalam ekonomi Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 143 ribu dan memiliki lebih dari 1.114 unit usaha yang beroperasi.

MONEY POLITICS RAWAN DI PILKADA

KPU Bandung Barat Minta PPK dan PPS Perkuat Integritas

NGAMPRAH (IM)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta panitia pemilihan kecamatan (PPK) ataupun panitia pemungutan suara (PPS) agar memiliki integritas yang kuat dalam pelaksanaan Pilkada Bandung Barat 2024 yang bakal dihelat pada 27 November mendatang.

Pasalnya, potensi kerawanan Pilkada Bandung Barat 2024 nanti diprediksi bakal didominasi pelanggaran politik uang atau money politics.

“Kerawanan Pilkada Bandung Barat 2024 tidak jauh berbeda saat Pilpres, Pileg dan Pemilihan DPD pada 14 Februari 2024 lalu, yakni money politics,” kata Ketua KPU KBB Ripqi Ahmad Sulaiman, kemarin.

Untuk itu, jelas Ripqi, pihaknya harus bisa meyakinkan PPK maupun PPS agar senantiasa menjaga integritasnya sebagai penyelenggara Pilkada Bandung Barat 2024.

“Demi memperkuat Badan Ad Hoc baik PPK maupun PPS, kami akan menyampaikan dalam orientasi tugas agar mereka memahami tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai

penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Ripqi menilai, tingkat fokus kinerja Badan Ad Hoc pada Pilkada 27 November 2024 nanti bakal lebih baik mengingat PPK dan PPS kebanyakan dari kalangan milenial.

Sehingga, mereka memiliki banyak waktu dalam melaksanakan setiap tahapan pada Pilkada Bandung Barat 2024.

Saya yakin milenial yang terlibat banyak waktu,” ucapnya.

Seperti diketahui, sebanyak 80 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 resmi dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ripqi Ahmad Sulaiman pada Kamis 16 Mei 2024.

Pada perekrutan dan calon peserta PPK dan PPS, sambung Ripqi, banyak generasi milenial yang terlibat. Hal ini tentu menjadi kesempatan buat mereka lebih tahu lagi bagaimana mengelola Pemilu ini.

“Ini membuktikan mereka sudah semakin punya motivasi untuk terlibat menjadi penyelenggara Pemilu,” ucapnya. **pra**